



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR. 100.3.3 – 07 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR: HK.00.00 – 22 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa perubahan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Belitung Timur Nomor: 100.3.2/301/B/BUPATI/2026 tanggal 9 Juli 2026 hal penyampaian usulan tambahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 dan surat Bupati Belitung Timur Nomor: 100.3.2/410/B/BUPATI/2026 tanggal 27 Juli 2026 hal Penyampaian Perubahan Propemperda 2026.

2. Rapat Bapemperda dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan OPD pemrakarsa tanggal 27 Juli 2026.

3. Rapat Paripurna XXVII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 Penyampaian Usulan Tambahan Propemperda Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR: HK.00.00-22 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Merubah lampiran pada Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor : HK.00.00-22 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,




FEZZI UKTOLSEJA

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PD PENGUSUL	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1.	Perda	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	a. Pembentukan Badan; b. Penggabungan Perangkat Daerah/Dinas	-	✓	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	-	✓	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi)	Triwulan I
2.	Perda	Rencana Perlindungan dan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	✓	-	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang	✓	-	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I

		Pengelolaan Lingkungan Hidup				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
3.	Perda	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Ketentuan Umum dan Program b. Kepersertaan c. Peran Pemerintah Daerah d. Program Perlindungan Pekerja Rentan e. Pembinaan dan Pengawasan f. Pembiayaan g. Sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	√	-	DPRD	Triwulan I
4.	Perda	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	a. Peran Perusahaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah b. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Merupakan Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	√	-	DPD	Triwulan I

5.	Perda	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Riset, Inovasi Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi, Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Penilaian dan Penghargaan, Penyebaran Riset dan Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Riset Inovasi Daerah 3. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Triwulan I
6.	Perda	Strategi Promosi Penanaman Modal	a. Ketentuan Umum b. Tujuan Dan Sasaran Promosi Penanaman Modal	√	-	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	√	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Triwulan I

			c. Strategi Promosi Penanaman Modal d. Penyediaan Sarana Promosi e. Pelaksanaan Kegiatan Promosi f. Koordinasi Promosi g. Peran Dan Tanggung Jawab h. Pembinaan Dan Tanggung Jawab i. Ketentuan Peralihan j. Ketentuan Penutup			2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal			Terpadu Satu Pintu	
7.	Perda	Rencana Tata Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026-2046	1. Ketentuan Umum 2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang 3. Rencana Struktur Ruang Wilayah 4. Rencana Pola Ruang Wilayah 5. Kawasan Strategis Kabupaten 6. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah 7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 8. Peran Masyarakat dan Kelembagaan 9. Ketentuan Penyidikan 10. Ketentuan Pidana	√	-	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana	√	-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan I

						Tata Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang				
8.	Perda	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawab an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	√	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan II
9.	Perda	Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, Ketentruman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	1. Penyelenggaraan Keterlibatan Umum 2. Penyelenggaraan Ketentruman Masyarakat 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat 4. Peran Masyarakat Aparatur 5. Pengawasan Penegakan Hukum 6. Pembinaan 7. Pelaporan 8. Pendanaan 9. Ketentuan Penyidikan Serta dan	√	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketentruman Masyarakat serta	√	-	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulan II

10.	Perda	Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 tahun 2018 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Pencabutan atas Daerah Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bendahara atau Pejabat Lain	-	✓	Inspektorat	Triwulan II
11.	Perda	Perseoran Terbatas Pembangunan Belitung Timur (Perusahaan Perseroan Daerah)	1. Nama dan Tempat Kedudukan 2. Kegiatan Usaha 3. Modal dan Saham dan 4. Pembinaan Pengawasan 5. Pembubaran 6. Sanksi	✓	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	✓	-	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam)	Triwulan II
12.	Perda	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Penetapan Cadangan Pangan 2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan 3. Kesiapsiagaan Krisis Pangan	✓	-	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor	✓	-	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan II

			Panangulangan Krisis Pangan 4. Penyimpanan Pangan Pokok 5. Sistem Informasi Cadangan Pangan 6. Peran Masyarakat Serta 7. Pengawasan dan Pelaporan 8. Pembiayaan			17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah				
13.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	√	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan III
14.	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	√	Badan Pengelolaam Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan III
15.	Perda	Hari Jadi Kelapa Kampit	Penetapan Hari Jadi Kelapa Kampit	√	-	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka	√	-	Kecamatan Kelapa Kampit	Triwulan III

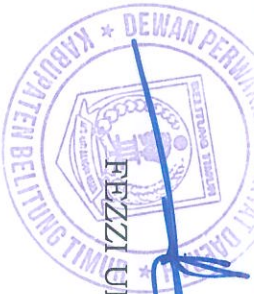
					Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
16.	Perda	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	a. Jenis Dan Klasifikasi; b. Kewenangan Pemerintah Daerah; c. Pengendalian Minuman Beralkohol; d. Minuman Oplosan; e. Perizinan; f. Peran Serta Masyarakat; g. Pembinaan Dan Pengawasan; h. Sanksi Administrasi; i. Ketentuan Penyidikan; j. Ketentuan Pidana; k. Ketentuan Peralihan; l. Ketentuan Penutup.	√	-	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Beserta Perubahannya (Undang-Undang Cipta Kerja); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Menteri Perdagangan	√	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan III

						Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pederaran, dan Penjualan Minuman				
17.	Perda	Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Pasal 2, yakni 1. Pembentukan Perangkat Daerah yaitu Badan Keuangan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah; 2. Kenaikan Tipe Badan Penanggulangan Bencana Daerah.		✓	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	✓	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi)	Triwulan III
18.	Perda	Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perlindungan Bagi Guru dan Tenaga Pendidik	✓	-	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	✓	-	DPRD	Triwulan IV

					2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen					
19.	Perda	Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual	1. Inventarisasi dan Pendaftaran Potensi Kekayaan Intelektual Daerah; 2. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; 3. Pembinaan, Pendampingan, dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual; 4. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya Nasional; dan 5. Pengembangan Identifikasi Geografis dan Potensi Unggulan Daerah.	√	-	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	√	-	DPDRD	Triwulan IV

KETUA DPRD

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



FEZZI UKTOLSEJA

